

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Isu tentang pemanasan global telah menjadi ancaman bagi keamanan setiap manusia, karena semakin meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan di bumi dan faktor penyebab adalah aktivitas manusia yang secara terus menerus menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batubara, gas dan minyak bumi. Pada saat ini peningkatan emisi GRK tidak hanya disebabkan oleh sektor industri yang dihasilkan oleh negara maju, namun negara berkembang juga ikut terlibat menyumbang emisi GRK. Peningkatan emisi ini dihasilkan dari deforestasi dan degradasi hutan yang telah mencapai 20% dari keseluruhan emisi GRK global setiap tahunnya.¹

Secara global, pembahasan mengenai isu lingkungan dimulai sejak tahun 1972 dalam *Stockholm Conference on Human Environment* yang kemudian membangun kesadaran masyarakat internasional terkait buruknya dampak pemanasan global (*global warming*) bagi keberlangsungan makhluk hidup. Dampak dari pemanasan global cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan mengancam apa yang

¹ Melati Anggraini., “*Jepang dalam Politik REDD+ di Indonesia: Tinjauan Konstruktivis*”, Tesis pasca sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

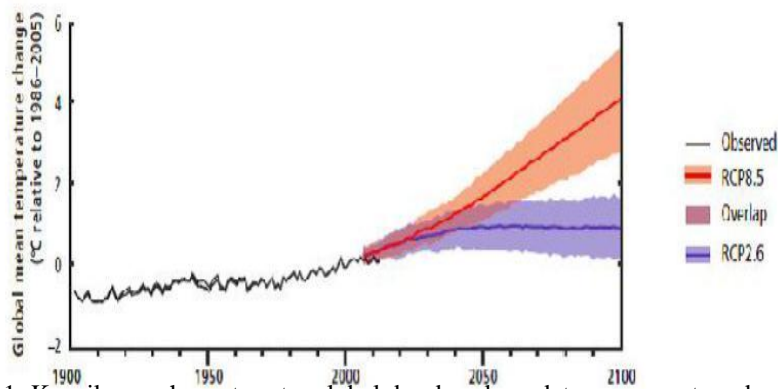
disebut sebagai *human security*.² Perubahan iklim yang disertai dengan perubahan temperatur tersebut diperkirakan dapat mencairkan es yang ada di kutub utara. Apabila hal tersebut benar-benar terjadi, kemungkinan besar pulau-pulau yang memiliki permukaan rendah akan terendam air. Dan sebaliknya, wilayah-wilayah hutan yang sebelumnya gersang karena udara yang panas dan keterbatasan air, akan mengalami proses deforestasi karena panas bumi yang berlebihan.³

Laporan IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) menguraikan bukti-bukti bahwa iklim mengalami perubahan yang sangat dirasakan oleh umat manusia. Naiknya suhu bumi hingga mencapai 0,8°C pada kurun waktu 100 tahun belakang ini. Kurun waktu tiga dekade terakhir ini terus menerus dan jauh lebih meningkat dibandingkan waktu sebelumnya. Berdasarkan kerangka pemodelan yang dibuat oleh peneliti, maka akhir 2100, suhu global akan lebih hangat 1.8-4°C dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999. Jika dibandingkan dengan fase pra-industri (1750), meningkatnya suhu global ini setara dengan 2.5-4.7°C. faktor kenaikan suhu bumi terutama disebabkan oleh masuknya energi

² Hasbi Sidik, "*Politik Lingkungan Internasional Indonesia Terkait Reducing Emissions From Deforestation and Degradation (REDD+)*", Tesis Pasca sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013

³ Ibid

panas ke lautan (kurang lebih 90% dari total pemanasan), dan terdapat bukti bahwa laut terus menghangat selama periode ini.⁴



Gambar 1.1 Kenaikan suhu rata-rata global berdasarkan data pengamatan dan proyeksi skenario *Representative Carbon Pathway* (RCP) 2.6 dan RCP 8.5 (IPCC 2014)

Pada tahun 1986, para ilmuwan bahkan telah menemukan lubang ozon di langit Antartika.⁵ Fenomena ini menjadi isu utama yang semakin mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil oleh semua Negara. Dengan melihat fenomena tersebut, negara-negara di dunia mulai menyadari bahaya yang bersifat global. Dengan melihat fenomena tersebut, negara-negara kemudian berusaha membentuk kesadaran internasional, bahwa ada ancaman bersama terhadap keselamatan umat manusia. Melalui perundingan internasional perubahan iklim dan konferensi yang berfokus pada lingkungan hidup negara-negara yang tergabung didalamnya berusaha merumuskan kebijakan yang dianggap

⁴ http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/buku_pintar/buku-pintar-PPI-21-6-2016-ISBN-FA_opt.pdf.

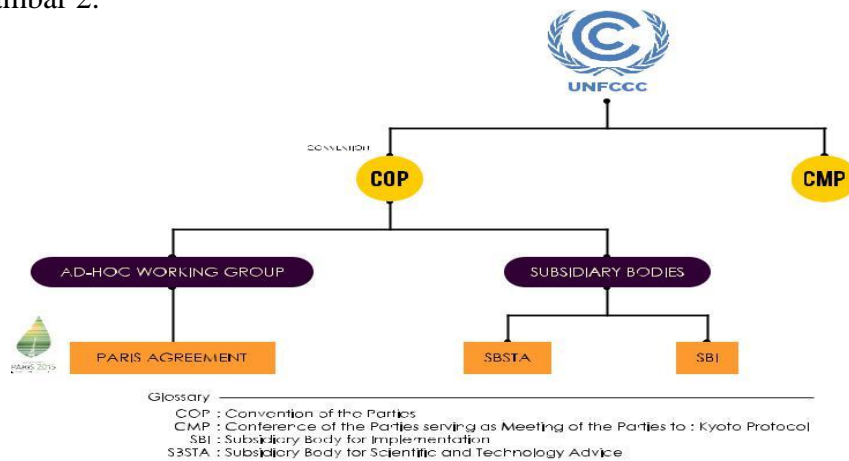
⁵ World Bank, *Development and Climate Change*, Washington D.C, World Bank, hlm. 6.

dapat menekan lajunya pemanasan global. Perhatian dunia terkait lingkungan pertama kali ditandai oleh terbentuknya *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) sebagai Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan menyelenggarakan konvensi tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang bertajuk “*UN Conference on Environment and Development, UNCED*” (KTT bumi) di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992.⁶

Agar tujuan konvensi dapat terimplementasi dengan baik, dibentuklah badan pengambilan keputusan tertinggi yaitu Pertemuan Para Pihak (Conference of the Parties, COP) dibawah UNFCCC. Fungsi dari Pertemuan Para Pihak adalah mengkaji pelaksanaan Konvensi, memantau pelaksanaan kewajiban para Pihak sesuai tujuan Konvensi, mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi, membuat rekomendasi kepada Para Pihak, dan mendirikan badan badan pendukung jika dipandang perlu. COP/CMP merupakan pertemuan tahunan Para Pihak United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC dan *Conferences of the Parties serving as meeting of parties to the Protokol Kyoto* (CMP). COP/CMP adalah otoritas pengambilan

⁶ Daniel Mudiyarso, *Sepuluh Tahun Negosiasi, Konvensi Perubahan Iklim*, Kompas, Jakarta, hlm. 23. 2003

keputusan tertinggi di bawah UNFCCC, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.⁷



Gambar 1. 2 struktur konvensi perubahan iklim

Pertemuan lanjutan ini merupakan *Conference of the parties* ke 21 (COP-21). Perjanjian Paris mencerminkan keseimbangan yang kompleks dari pandangan para pihak UNFCCC untuk bersama-sama mengatasi perubahan iklim yang saat ini sudah kita alami. Proses negosiasi yang transparan dan inklusif telah menghasilkan tingkat kepercayaan yang tinggi meskipun melalui proses tawar menawar dan tarik menarik, akhirnya 196 negara pihak UNFCCC dapat mencapai suatu kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Paris pada 12 Desember 2015.⁸

Namun perang terhadap pemanasan global menuai tantangan. Sejumlah negara berbasis manufaktur dan industri berat enggan untuk

⁷ Op.Cit., hal. 10.

⁸ Ibid. Hal.

terlibat dalam usaha menekan laju pemanasan global.⁹ Tindakan untuk menekan pemanasan global dianggap merugikan sektor industri berat dan manufaktur yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian suatu negara. Jika industri dan manufaktur tertekan, maka perekonomian suatu negara menjadi taruhannya.¹⁰ Banyak pihak, termasuk pemerintah Amerika Serikat yang sangsi bahwa perubahan iklim disebabkan oleh perbuatan manusia. Mereka ini mengacu pada pendapat bahwa perkembangan lingkungan alam lah yang terutama berpengaruh mengubah iklim.

Indonesia memproduksi gas rumah kaca dalam jumlah yang signifikan. Emisi GRK Indonesia berkontribusi sebesar 5% dari total emisi GRK dunia. Kontribusi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontribusi atas produk Domestik Bruto (PDB) dunia sebesar 0,6 persen pada tahun 2005. Indikator ini menunjukkan bahwa laju kenaikan emisi GRK jauh diatas kenaikan PDB serta memberikan indikasi ke arah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak berkelanjutan.¹¹

⁹ Biermann, F. & Brohm, R., *“Implementing Kyoto Protocol without the USA : the strategic role of tax adjustments at the border. Climate Policy”*, Volume 4, pp.289-302, 2005.

¹⁰ Renny Candradewi Puspitarini., *“Politik Inkostitensi AS dalam Upaya Mengatasi Pemanasan Global: Hambatan Tarif Produk Panel Surya”*, Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

¹¹ Hasbi Sidik., *Politik Lingkungan Internasional Indonesia Terkait Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

berdasarkan data diatas, maka kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terganggu dan tidak berkelanjutan menjadi pendorong Indonesia melakukan diplomasi lingkungan dengan memanfaatkan poin poin pada *Bali Action Plan* pada COP ke 13, skema REDD+ guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta menjalankan visi dan misi pembangunan Indonesia di Era pemerintahan Joko Widodo. Peran Indonesia dalam isu perubahan iklim cukup konsisten, dengan membentuk *Indonesia Forest Climate Alliance* (IFCA) pada bulan Juli tahun 2007. IFCA adalah payung atau forum untuk komunikasi/ koordinasi/ konsultasi para stakeholder dalam membahas isu- isu REDD.

Tergabungnya Indonesia ke dalam anggota G-20 dan menjadi salah satu ekonomi yang terus tumbuh di kawasan ASEAN, indonesia menginterpretasikan perannya dalam dunia internasional adalah sebagai representasi dan juru bicara negara- negara yang berada dalam proses perkembangan. Namun yang menjadi kritik ialah, pernyataan sikap politik luar negeri ini tidak disertai oleh langkah-langkah nyata dari pihak pemerintah, jika melihat keterlibatan Indonesia dalam tatanan interasional terkait lingkungan. di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, perubahan iklim dijadikan salah satu pokok pekerjaan pemerintah yang disusun melalui RKP (rencana kerja pemerintah). Bertepatan dengan

pelaksanaan COP ke 13 di Bali, Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan tahunan negara- negara antar pihak dibawah UNFCCC tersebut. Indonesia tampil sebagai tuan rumah sekaligus terpilih sebagai presiden UNFCCC dalam COP tersebut.

Indonesia juga telah menjadi tuan rumah dalam agenda Konferensi Kelautan Dunia yang pertama pada tahun 2009 di Sulawesi. Pada bulan April 2011 lalu, ibukota Jakarta menjadi tuan rumah Konferensi tingkat Tinggi Bisnis Peduli Lingkungan, konferensi paling penting di dunia mengenai pelestarian lingkungan hidup komersial. Dan dalam masa pemerintahan presiden Joko Widodo Indonesia berinisiatif mendukung penandatanganan perjanjian paris di tahap *open for signature* (tahapan dimana Negara-negara yang tergabung dalam UNFCCC dan menghadiri COP ke 21 menyepakati ditentukannya satu tanggal guna meratifikasi hasil COP tersebut) yang berlangsung selama satu tahun mulai dari tanggal 22 April 2016 hingga 21 April 2017, dan Indonesia bergegas mengambil bagian pada tahap pembukaannya.¹² Sebagai negara berkembang, Indonesia menyampaikan komitmennya terkait penurunan GRK global melalui usaha sendiri (*unconditional*) sebesar 26%, dan ini adalah proyek ambisius indonesia sebagai bukti komitmen mencegah peningkatan suhu

¹² <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/117603-T%2025044-Kebijakan%20luar-Metodologi.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

panas bumi, dan juga sebagai perintis dikalangan negara-negara berkembang. Komitmen Indonesia sebagai Negara berkembang tersebut diupayakan bukan tanpa alasan yang jelas atau hanya sekedar turut meramaikan. Bahwa ada kepentingan nasional dalam politik luar negeri Indonesia yang berupaya mewujudkan visi dan misi pemangunan yang berwawasan lingkungan, membuka peluang ekonomi dan upaya diplomasi membangun wajah baru Indonesia dalam permasalahan lingkungan melalui KTT perubahan iklim di Paris pada tahun 2015.

B. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami politik lingkungan internasional Indonesia dalam KTT perubahan iklim di Paris pada tahun 2015

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran dinamika politik lingkungan internasional Indonesia dalam KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015.
2. Untuk memberikan analisis intepretatif mengenai kepentingan indonesia dalam KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015

C. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Riset ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademis bagi, mahasiswa, dosen, dan peneliti terkait isu politik lingkungan yang berkaitan dengan konvensi tingkat tinggi perubahan iklim. Dengan demikian secara rinci bahwa riset ini berkontribusi menjelaskan kebijakan lingkungan serta kepentingan negara Indonesia secara komprehensif akan dijelaskan pada bab III dan IV, memaparkan tantangan, kelemahan Indonesia dalam politik internasional yang memfokuskan terhadap KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015. Riset ini menjelaskan bagaimana kebijakan lingkungan internasional Indonesia sangat erat kaitannya dengan kepentingan nasional. dan hal tersebutlah yang diharapkan menjadi kontribusi kadademis peneliti.

b. Manfaat Praktis

hasil penelitian dapat dijadikan masukan bagi stakeholder atau instansi terkait dalam memahami politik lingkungan internasional Indonesia dalam KTT perubahan iklim. Dimana dapat melihat kelebihan Indonesia dalam aspek kehutanan, dan negara kepulauan yang panjang. Sebagaimana dijelaskan dalam bab IV bahwa indonesia dapat memainkan peran nya dengan memanfaatkan luas

hutan (hutan hujan tropis) serta sebagai negara yang akan merasakan dampak perubahan iklim karena memiliki pulau yang panjang serta luas. Keuntungan Indonesia ataupun kelemahan Indonesia sebagai negara berkembang, sebagaimana yang dipaparkan oleh peneliti dalam penelitian ini dapat menjadi masukan yang baik dan nyata bagi pihak-pihak terkait.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan sebagai berikut : mengapa pemerintah Indonesia sangat mendukung disepakatinya fase open for signature dan ratifikasi oleh negara- negara anggota UNFCCC pada KTT perubahan iklim di paris tahun 2015?

E. Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa hasil kajian dan studi mengenai politik lingkungan dan konferensi internasional perubahan iklim dalam menyoroti berbagai permasalahan di masyarakat. hasil studi tersebut digunakan sebagai bahan untuk melihat perbandingan, persamaan, kelebihan dan kekurangan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai politik lingkungan internasional Indonesia dalam KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015.

Penelitian *pertama* menyatakan berakhirnya perang dingin telah mendorong negara- negara di dunia untuk bekerja sama guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Berangkat dari suatu isu perubahan iklim, beberapa negara maju berusaha mendorong negara- negara berkembang agar membenahi daerahnya. Hal ini juga berkaitan dengan kewajiban negara- negara maju sebagai negara- negara yang dikategorikan sebagai *annex-I* dalam COP. Ratifikasi *Kyoto Protocol* telah membebani negara maju untuk mengurangi penggunaan gas emisinya dalam jumlah yang cukup banyak, Swedia sebagai salah satu negara maju telah berhasil mengurangi laju penggunaan emisinya selama 20 tahun terakhir dengan efektif. Hal ini telah menjadikan swedia sebagai negara terhijau di dunia, reputasi ini digunakan Swedia sebagai strategi diplomasi lingkungan dalam menyebarkan persepsi- persepsi hijau di tingkat internasional.

Minimnya kesadaran masyarakat dan SDM di Indonesia menjadikan kerjasama lingkungan Swedia dan Indonesia menjadi lebih signifikan. Strategi diplomasi lingkungan Swedia ini berupa pengelolaan lingkungan yang menggunakan kapasitas kota sebagai kekuatan utama. Dalam konsep diplomasi lingkungan menurut Broadhead, permasalahan lingkungan harus dihadapi secara kolektif dimana pemerintah membutuhkan komponen seperti instansi pemerintah, tenaga pengajar, komunitas bahkan masyarakat secara bersamaan, kerjasama antar aktorf

ini membutuhkan waktu yang cukup lama namun terus mempunyai proses dan aktivitasnya. Kerjasama Swedia dan Indonesia yaitu dengan kota palu telah menghasilkan program WRD yang secara khusus menangani permasalahan sampah. Program WRD adalah lanjutan dari program *Symbio City* yang diimplementasikan di kota palu, pendekatan ini mempunyai banyak aktivitas dan pencapaian untuk kota palu, seperti *Palu Energy* yang merupakan target kota palu dalam 20 tahun kedepan.

Dengan berhasil mengimplementasikan strateginya, Swedia secara langsung juga memenuhi kepentingan nasionalnya sebagai negara hijau sekaligus negara maju yang merupakan anggota dari COP untuk mendorong pelaksanaan pemerataan pemeliharaan lingkungan. adapun kepentingan Swedia didalamnya adalah Swedia telah berhasil membangun reputasi yang baik di tingkat internasional. Reputasi ini diidentifikasi sebagai bentuk dari perbaikan reputasi negara *post-industrial* untuk membawa perubahan yang lebih baik di dunia. Selain itu juga bertujuan untuk menarik lebih banyak negara- negara di dunia untuk mengimplemntasikan pendekatan *symbio City* sebagai solusi untuk menghadapi permasalahan urbanisasi sekaligus mangatasi perubahan iklim.¹³

¹³ Disa Daramantasya L., *Strategi Pemerintah Swedia Dalam Diplomasi Lingkungan di Indonesia :studi kasus pendekatan Symbiocity di Kota Palu*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Penelitian yang *kedua* menjelaskan bahwa kita menghadapi fenomena “bumi semakin panas” yang berdampak terhadap “perubahan iklim” akibat konsentrasi CO₂-ekuivalen yang terbentuk di udara. Sebelum revolusi industri terdapat lapisan CO₂e setebal 280 ppm. Setelah revolusi industri (1780), konsentrasi CO₂ meningkat dari 315ppm (1930) ke 330 ppm (1970), 360 ppm (1990), dan 380 ppm (2008). Bila *business as usual* berlanjut dalam pembangunan, pada tahun 2050 diperkirakan kita mencapai 500ppm atau dua kali lipat sebelum revolusi industri.

Kenaikan suhu bumi berdampak pada mencairnya es di kutub bumi dan meningkatnya permukaan laut. Berubahnya suhu air laut dapat mempengaruhi arus angin menjadi angin topan yang frekuensinya cukup bahkan sangat kencang. Hal ini sangat berdampak buruk bagi wilayah yang berada di pesisir dan dapat menenggelamkan wilayah yang berada di kawasan samudera pasifik, pulau-pilau Nauru, Vanuatu, Kiribati, dan kepulauan Marshall sudah tenggelam pada musim pasang. Terjadi penghambatan aliran air yang mengalir ke laut karena kenaikan permukaan laut sehingga air sungai terhempas kembali ke hulu menimbulkan banjir.¹⁴ Jelas tampak dalam perubahan iklim pada keberlanjutan hidup alami dan manusia sehingga mengancam ketahanan

¹⁴ Emil Salim., *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Kompas, Jakarta, 2010, hal.13-14

dan keberlanjutan hidup bangsa kita. Sudah seyogyanya perubahan iklim menempati prioritas tinggi dalam agenda pembangunan. Dalam *Conference of the Party (COP) 15* di Kopenhagen, Denmark pada pertengahan Desember 2009 dua negara yang terkena ancaman perubahan iklim yaitu Maldives dan Nepal menyatakan bahwa jika tidak ditemukan kesepakatan dalam COP 15 maka Maldives akan tenggelam. Dan presiden Nepal pun mengemukakan kekhawatiran akibat mencairnya es Mount Everest. Ada kekecewaan terhadap pertemuan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) di Kopenhagen, karena sulitnya menemukan kata sepakat, terutama bagaimana negara-negara industri dan manufaktur besar bersikap menolak usulan terkait pengurangan dan penekanan emisi gas dari negara-negara maju dan semi maju.¹⁵

Dan penelitian *ketiga* menjelaskan tentang politik lingkungan internasional Indonesia terkait REDD+ yang merupakan salah satu skema dalam isu perubahan iklim yang ada di *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Selanjutnya juga dibahas keuntungan apa yang diharapkan dari langkah politik lingkungan internasional tersebut. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Indonesia sebagai salah satu negara penghasil gas emisi terbesar di dunia dari

¹⁵ Ibid, hal. 15.

deforestasi dan degradasi hutan melihat dukungan atas REDD+ bisa menjadi salah satu cara perbaikan citra di dunia internasional. Indonesia bisa juga memperoleh pendanaan dari luar negeri guna memperbaiki tata kelola hutannya. Lebih jauh dengan memasukan skema REDD+ dalam mekanisme *Carbon Market*. Indonesia berpeluang memperoleh jumlah uang yang cukup besar. Namun skema REDD+ belum tentu menjamin perbaikan hutan. Ini dapat dilihat dari alotnya negosiasi skema REDD+ yang belum selesai di dalam UNFCCC.¹⁶

Tabel. 1.1 *Literatur Review*

No	Nama penulis dan judul	Temuan	Catatan
1	Disa Daramantasya L. (<i>Strategis Pemerintah Swedia Dalam Diplomasi Lingkungan di Indonesia: Studi Kasus Pendekatan Symbiocity di Kota Palu</i>)	Kerjasama internasional antara Indonesia dan Swedia dengan metode <i>symbio city</i> yang di implementasikan di kota Palu menjadi salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan urbanisasi dan mengatasi perubahan iklim.	upaya pembangunan <i>image</i> negara post-industrial yang peduli terhadap lingkungan berbanding lurus dengan pemecahan masalah energy di kota Palu. Hal ini dapat dilihat dengan masih terdapatnya permasalahan energy di kota Palu.

¹⁶ Hasbi Sidik., *Politik Lingkungan Internasional Indonesia Terkait Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

Tabel 1.1 (sambungan

2	Emil Salim <i>(Ratusan Bangsa Merusak Satu bumi)</i>	Fenomena bumi semakin panas berdampak terhadap perubahan iklim. Beberapa pulau telah merasakan dampaknya seperti Nauru, karibati, Nauru dan kepulauan Marshal. Dalam UNFCCC ke 15 terjadi ketakutak oleh Maldives, dan Nepal jika tidak tercapainya kesepakatan maka negara-negara tersebut akan menyusul seperti pulau-pulau yang Telah merasakan dampak dari mencairnya es di kutub utara akibat naiknya suhu bumi.	Dalam buku tersebut, Emil salim tidak menonjolkan posisi Indonesia yang juga sebagai negara kepulauan dan memiliki beberapa wilayah pulau yang berpermukaan rendah
3	Hasbi Sidik <i>(Politik Lingkungan Internasional Indonesia Terkait Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+)</i>	REDD+ merupakan skema dalam isu perubahan iklim yang ada di UNFCCC. REDD+ memberikan keuntungan bagi indonesia dalam mendukung pembangunan nasional. REDD+ juga menjadi upaya merubah citra Indonesia di tingkat internasional.	Dalam penelitian tersebut, Hasbi sidik hanya menitik beratkan kedalam keuntungan ekonomi, namun kurang menyentuh aspek politik yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi Indonesia.

F. Landasan Konseptual

a. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional (*national Interest*) mengemukakan bahwa kepentingan nasional merupakan dasar yang menentukan perilaku luar negeri suatu negara. Perilaku politik luar negeri yang berdasarkan pada kepentingan nasional akan cenderung mengarah pada upaya-upaya mengejar kekuasaan atau *power*. Para pemikir realis mengemukakan bahwa *power* merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk memelihara dan mengembangkan kontrol suatu negara terhadap negara lain. Charles O. Lerche dan Abdul Said telah menjumlahkan kapabilitas negara menurut komponen yang terlihat (*tangible*) dan (*intangible*).¹⁷ Beberapa elemen *power* yang terlihat (*tangible*) seperti penduduk, wilayah, SDA, kapasitas industri, dan kekuatan militer. Sedangkan beberapa elemen *power* yang tidak terlihat seperti kepemimpinan, efisiensi organisasi atau birokrasi, persatuanrakyat, dukungan luar negeri dan ketergantungan. Selain itu Frederick Schuman berpendapat bahwa dalam sebuah sistem internasional yang tidak memiliki pemerintahan bersama, masing-masing unit harus mencari keselamatan dengan bersandar pada

¹⁷T. Coulombis and Wolfe, J., *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*, Prentice Hall Inc., USA, 1986, hal. 134.

kekuatannya sendiri dan melihat kekuatan tetangga sekitarnya dengan rasa khawatir.¹⁸

Kepentingan nasional merupakan konsep mendasar yang terdapat dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional sangat berperan dalam menentukan perilaku suatu negara. Kepentingan nasional ini juga seringkali menjadi pembenar dari setiap kebijakan yang dipilih oleh negara.

“kepentingan nasional merupakan bentuk dari tujuan kebijakan luar negeri suatu negara atau sebagai suatu bentuk kekuatan strategis”

“kepentingan nasional (national interest) adalah tujuan –tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup keberlangsungan hidup rakyatnyadan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity), pasti merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.”T. May Rudy.¹⁹

Konsep kepentingan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton diberi batasan sebagai berikut :tujuan mendasar serta factor yang memandu para pembuat keputusan (*decision making*)dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsep yang sangat umum dan merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi Negara untuk mencakup kelangsungan hidup bangsa dan

¹⁸ H. Dahlan, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Garasi, Yogyakarta, 1997, hal. 56

¹⁹ T. May Rudy., *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 116

Negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.²⁰

Pengertian kepentingan nasional suatu Negara bisa tergantung dari sumber daya alam yang tersedia untuk dapat memaksa atau meyakinkan Negara lain untuk bekerjasama dalam ruang lingkup, dimana semua Negara memiliki kepentingan masing-masing. Konsep kepentingan nasional ini berkaitan dengan adanya cita-cita dari suatu Negara yang berusaha dicapai melalui hubungan serta kerjasama yang solid dan harmonis dengan Negara lain.

Menurut Hans J Morgenthau, Kepentingan nasional merupakan pilar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu Negara. Kepentingan nasional suatu Negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lain. Kekuasaan tidak akan tercapai tanpa adanya kekuatan nasional dan politik suatu Negara tidak terlepas dari kepentingan nasional, karena tujuan politik luar negeri adalah mencari, mempertahankan dan memperkuat kepentingan nasional.²¹

²⁰ Jack C Plano dan Roy Olton, " *International Relations Dictionary*" Rinehart and Winston Inc USA, 1969, Hal 128

²¹ Hans J Morgenthau, "*Politik Antar Bangsa*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991. Hal. 5.

b. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan refleksi dari realitas yang terjadi di dalam negeri, juga dipengaruhi oleh situasi internasional. Hal tersebut diperkuat oleh Rosenau yang menjelaskan pengkajian kebijakan luar negeri suatu negara akan menghadapi situasi kompleks meliputi kebutuhan eksternal dan kehidupan internal. Berarti kedua kebutuhan tersebut sangat mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri. Adanya faktor internal merupakan tempat pertautan kepentingan nasional, sedangkan eksternal merupakan tempat dimana negara-negara dapat mengartikulasikan kepentingan nasional sehingga kepentingan tersebut dapat tercapai.²²

Menurut Mochtar Kusumaatmadja penjelasan corak bebas dan aktif dari politik luar negeri, sebagai berikut :

*“bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif-raktip atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersikap aktif”.*²³

²²Wirda Wanda Sari Bekarekar, “Alasan Indonesia dalam Melakukan Kerja Sama dengan Melanesian Spearhead Group (MSG)”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

²³ Ibid.

Sehingga kebutuhan eksternal dan internal dapat tergambar melalui politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, bahwa untuk merumuskan prinsip tersebut juga diwarnai akan dinamika politik internasional.

Selanjutnya, agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional yang senantiasa berubah disesuaikan dengan kepentingan nasional. Pada masa pemerintahan Joko Widodo mengungkapkan prinsip “bebas-aktif” dalam politik luar negeri Indonesia, namun landasan operasionalnya adalah menganut pada prinsip Trisakti. Prinsip Trisakti ini merupakan arah politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Makna dari prinsip Trisakti yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo di masa pemerintahannya ialah sebagai berikut :²⁴

1. Berdaulat di bidang politik, hakikat terpenting dari Negara yang berdaulat. Kemampuan untuk menjaga kemandirian dan mengaktualisasikan kemerdekaannya dalam seluruh aspek kehidupan bernegara.
2. Berdikari di bidang ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang

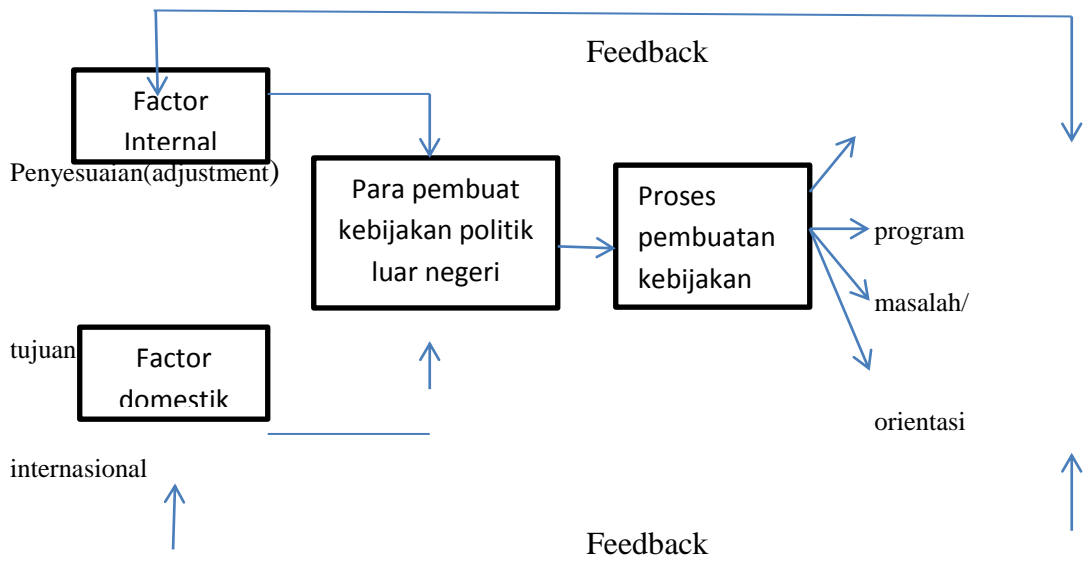
²⁴ Ibid. Hal.16

kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan Negara dan pelaku utama pembentukan produksi.

3. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong royongan berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementsai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Presiden Joko Widodo dalam menerapkan Politik Luar Negeri bebas aktif adalah mengintepretasikan makna “bebas” didasarkan pada kemandirian dan kedaulatan dari Indonesia dalam menentukan kebijakan dan arah politik itu sendiri. Pemaknaan “Aktif” dalam politik Luar Negeri Presiden Joko Widodo adalah dimaknai dengan mewujudkan misi yaitu terselip makna gotong royong yang dalam hal ini dimankai dengan menciptakan kemandirian dan kedaulatan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan dapat merangkul berbagai kekuatan dan terlibat aktif dalam berbagai momentum-momentum kerjasama. Kebijakan pengambilan keputusan Politik Luar Negeri mengacu pada pilihan Individu, kelompok dan koalisi yang mempengaruhi tindakan suatu bangsa di kancah internasional. Keputusan Kebijakan Luar Negeri biasanya memiliki resiko yang tinggi dan ketidakpastian yang sangat besar.

Politik Luar Negeri adalah seperangkat maksud, tatacara, tujuan, yang diformulasikan oleh orang-orang dalam posisi resmi atau otoritatif, yang ditujukan kepada sejumlah actor maupun kondisi di lingkungan luar wilayah kekuasaan suatu Negara, yang bertujuan mempengaruhi target tertentu dengan cara yang diinginkan oleh para pembuat keputusan. Agar lebih jelas, berikut adalah skema pembuatan kebijakan luar negeri :



Gambar 1.3 skema pembuatan kebijakan luar negeri

Terdapat dua factor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri : factor internasional dan factor domestic. Kedua factor ini digunakan sebagai basis pertimbangan oleh para pembuat kebijakan politik luar negeri, yang melakukan proses pembuatan keputusan. Keputusan yang dihasilkan

dapat berupa penyesuaian, program, masalah/ tujuan dan orientasi internasional.

Dalam memaparkan analisis terhadap kebijakan luar negeri terdapa tiga teori dasar mengenai studi analisis kebijakan luar negeri yakni realism, liberalism, dan constructivism. Realism melihat setiap kebijakan luar negeri suatu Negara didasari konsep *groupism*, *egoism* dan *power centrism*. Pada konsep *groupism*, yang berarti bahwa Negara membutuhkan warga masyarakat satu sama lain guna memnuhi kebutuhan bersama sehingga Negara merupakan kumpulan kesatuan warga masyarakat itu snediri. Kemudian yang kedua yaitu *egoism*, yang berarti persaingan antar Negara akan dikejar oleh masing- masing pihak tanpa memperdulikan pihak lainnya karena kondisi anarki dan perang yang merupakan hal yang tidak dapat dielakan. Dan konsep *power centrism*, berarti adanya penggunaan kekuatan Negara yang krusial kaitannya dengan kepentingan Negara.²⁵ Dalam teori realism hanya sekelompok Negara yang berperan didalamnya yaitu Negara yang memiliki power terbesar yang memanfaatkan *power* terkait adanya konflik.

Selain itu david singer menggunakan pendekatan berdasarkan tingkatan ruang lingkup dalam analisis yang disebut sebagai level of

²⁵ Wohlforth, wiliam C, “*Realism and foreign policy*”, dalam Steve Smith and Amelia Hadfield & Tim dunne, *Foreign Policy, Theories, Actors, Cases*, Oxford, 2012.

Analysis (LoA), mengatakan bahwa ruang lingkup dibagi menjadi dua, yakni tingkat domestic dan tingkat internasional. Tingkat internasional atau disebut sebagai level sistemik berfokus pada konsep tingkah laku dan sifat dari actor Negara itu sendiri yang mana dipengaruhi oleh kondisi system internasional yang ada pada masa tersebut.²⁶ Tingkat kedua adalah tingkat domestic atau sub-sistem. Tindakan Negara ketika dihadapi oleh sebuah fenomena pada domestic dalam negerinya mempengaruhi politik luar negeri negaranya. Nilai-nilai historis Negara, tradisi agama atau social, atau sifat ekonomi dan geografis Negara menjadi panduan Negara dalam menerapkan dan menciptakan kebijakan luar negerinya. Pada dasar *level of analysis* mencoba menjelaskan factor yang dapat mempengaruhi actor Negara dalam bertindak menggunakan kebijakan luar negerinya dalam menghadapi fenomena yang berasal dari factor-faktor yang ada.²⁷

Salah satu perspektif yang banyak mengalami perkembangan dalam HI ialah realism. Perspektif realism banyak membahas tentang perang dan keamanan yang berkaitan dengan militer dan power. Realism berkembang dan mendasar pada pemikiran “*man is evil*”. Actor dalam perspektif realism adalah Negara, sebagai suatu

²⁶ Op.Cit. Winda Sari Bekarekar. Hal.18

²⁷ Ibid. Hal. 18

individual yang tidak akan bekerjasama dengan actor lainnya tanpa ada maksud tertentu (*self-interest*) dan akan selalu berusaha untuk memperkuat dirinya sendiri. Strategi pendekatan yang digunakan oleh actor Negara dinamakan kebijakan luar negeri yang mana menentukan arah interaksi antar actor.

Sebagai actor utama, Negara berkewajiban mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam kancah politik internasional. Negara dalam konteks ini, diasumsikan sebagai entitas yang bersifat tunggal dan rational. Maksudnya adalah dalam tataran Negara, perbedaan pandangan politis telah diselaikan hingga menghasilkan satu suara. Sedangkan Negara dianggap rasional karena mampu mengkalkulasikan bagaimana cara mencapai kepentingan agar mendapat hasil maksimal. Seorang realis juga biasanya memusatkan perhatian pada potensi konflik yang ada diantara actor Negara, dalam rangka memperhatikan atau menjaga stabilitas internasional. Mengantisipasi kemungkinan kegagalan upaya penjagaan stabilitas. Memperhitungkan manfaat dari tindakan paksaan sebagai salah satu cara pemecahan terhadap perselisihan dan memberikan perlindungan terhadap tindakan pelanggaran wilayah perbatasan.²⁸ Oleh karena itu, *power* adalah konsep kunci dalam hal ini. Dasar normative realisme

²⁸ Ibid. Hal. 19

adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup Negara : ini merupakan nilai- nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis.

Power menurut Morgenthau dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : mengontrol pikiran dan tindakan, kemampuan mendapatkan apa yang diinginkan, dan untuk mendapatkan power tidak hanya dilakukan dengan senjata/ ancaman, tetapi dengan pengaruh diplomasi dan otoritas. Power pada dasarnya berarti memberikan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, dapat dilakukan dengan *hard power* maupun *soft power*. *Hard power* lebih bersifat memaksa dan kekerasan, contohnya dengan menggunakan kekuatan militer. *Soft power* bukan berarti tanpa kekuatan, namun soft power menggunakan pendekatan yang berbeda. Soft power lebih ditujukan pada perubahan cara pandang, ideology, dan sebagainya.²⁹

Banyu Perwita dan Muhammad Yani menjekaskan pula kebijakan politik luar negeri sebuah negara adalah *action theory* yang menyangkut sikap, perilaku, nilai, ideologi yang dimiliki sebuah negara untuk diperjuangkan. Kemudian T. May Rudi melanjutkan bahwa sisi variabel dari kebijakan politik luar negeri bertumpu pada keputusan-keputusan (*decision*) dan kebijakan-kebijakan (*policies*),

²⁹ Ibid. Hal. 22

yang diasumsikan untuk tujuan tertentu, pemilihan sarana dan cara implementasi. Kemudian disimpulkan oleh Holsti bahwa kebijakan politik luar negeri sebuah negara terdiri ada empat komponen yakni : (1) orientasi kebijakan politik luar negeri, (2) peran nasional, (3) tujuan dan (4) tindakan.³⁰

G. Argumen Utama

Dalam konvensi perubahan iklim di paris pada tahun 2015, pemerintah Indonesia sangat mendukung disepakatinya fase *open for signatute* bagi negara anggota serta menjadi salah satu negara *Non- Annex I* yang mendorong kesepakatan terlaksananya poin-poin pada perjanjian paris dengan meratifikasi perjanjian tersebut. Ada semangat yang cukup besar terlihat dari pemerintah Indonesia dalam KTT perubahan iklim di Paris pada tahun 2015. Hal tersebut tidak terlepas dari tiga kepentingan yang dibawa oleh Indonesia dalam Paris Agreement yaitu kepentingan politik dan kepentingan ekonomi yang satu sama lain saling berkaitan.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya

³⁰Laode Muhammad Fathun, “*Kebijakan Geopolitik Poros Maritim di Era Jokowi*” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

tentang suatu variabel, gejala dan keadaan.³¹ Dalam mekanisme penelitian yang melahirkan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari hasil pengamatan terhadap perilaku individu. Pendekatan ini ditujukan terhadap latar maupun individu secara utuh (*holistic*), tidak menyekat individu ke dalam variabel, tetapi juga memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh.³² Studi kasus merupakan metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bias digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.³³ Studi kasus adalah bentuk penelitian mendalam tentang suatu aspek lingkungan social termasuk manusia didalamnya, yakni memperhatikan keadaan sekarang, pengalaman masa lampau, latar belakang, dan lingkungannya.³⁴

Studi kasus merupakan metode penelitian yang cocok digunakan bilamana pokok pertanyaan suatu penelitian berkaitan dengan “bagaimana” dan “mengapa”. Di mana focus penelitiannya

³¹Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*”, PT. Renika Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 234.

³²Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Remaja Rosdakarya”, Bandung, 2005, hlm.3.

³³ Rachmat Kriyantono, “*Teknik Praktik Riset Komunikasi : Disertasi Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*”, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta, 2006.

³⁴ Consuelo G. Sevilla, dkk, “*Pengantar Metode Penelitian*” UI-Press, Jakarta, 1993. Hlm. 71.

terletak pada fenomena kontemporer(masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata, dan penelitian hanya memiliki sedikit peluang atau tak mempunyai peluang sama sekali untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki. Kekuatan unik dari metode studi kasus adalah kemampuannya untuk berhubungan dengan berbagai jenis bukti (multi sumber bukti) yaitu dokumen, wawancara, dan observasi.³⁵ Adapun alasan menggunakan metodologi kualitatif yaitu, *pertama* memperoleh tingkatan deskripsi dan analisis mendalam mengenai fokus penelitian dal hal ini politik lingkungan internasional Indonesia dalam KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015. Diperlukan prosedur-prosedur pengumpulan data kualitatif. Penggunaan metode kualitatif peneliti dapat mengeksplorasi data sebanyak-banyaknya dari subjek penelitian.

2. Lokasi Penelitian dan Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari perlebaran penjelasan mengenai Politik internasional Indonesia dalam KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015, maka dibutuhkan jangkauan yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini. Jangkauan penelitian ini berfokus pada tahun konferensi tingkat tinggi perubahan iklim di Paris pada tahun 2015.

³⁵ Yin Robert K, "*Studi Kasus : Desain Dan Metode*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

a. Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai Politik lingkungan internasional Indonesia dalam KTT perubahan iklim di Paris pada tahun 2015. Disamping itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada catatan-

catatan atau arsip–arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen–dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi ini, penulis lakukan untuk mengetahui kebijakan Politik lingkungan Internasional Indonesia.

c. Wawancara

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini pihak kementerian Luar Negeri yang paham dengan masalah kebijakan Lingkungan internasional Indonesia dalam perubahan iklim. Untuk keperluan penelitian ini maka informan merupakan pelaku yang terlibat secara langsung dalam kerjasama ini, maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam kerjasama ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan teknik wawancara melalui face to face, dan via email lewat internet jika terjadi kendala dan beberapa

hambatan. Hal ini dilakukan demi menjaga validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi gambaran sejarah pelaksanaan konvensi perubahan iklim

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang kebijakan Lingkungan Luar Negeri Indonesia

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang kepentingan Indonesia dalam
KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015

BAB V : kesimpulan/ penutup